



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITIS SHINTA DEWI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN II BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 851669

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.785.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 534 m²/275 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m²/270 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.020.000.000
3. Tanah Seluas 1736 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 310.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
5. Tanah Seluas 1112 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
6. Tanah Seluas 2262 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 465.000.000
7. Tanah Seluas 840 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 260.000.000
8. Tanah Seluas 7578 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2004, HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	890.355.312
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.895.355.312
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.895.355.312

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.